

Manual Indikator Kinerja Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir

Sasaran Kegiatan

SS. 1 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir Yang Berkualitas

Deskripsi SP

Deskripsi Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir Yang Berkualitas adalah kondisi terlaksananya pengelolaan sumber daya kemaritiman dan sumber daya alam di lingkungan laut dan pesisir yang dilakukan secara terintegrasi dalam waktu yang lebih singkat melalui penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil.

Indikator Kinerja

Persentase Rumusan Kebijakan Di Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir Yang Ditindaklanjuti

Deskripsi Indikator Kinerja :

Definisi:

Terdapat 3 Rumusan Kebijakan pada indikator kebijakan Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Pengelolaan Ruang Laut Dan Pesisir yang Ditindaklanjuti dan berikut adalah deskripsi dari masing-masing rumusan kebijakan tersebut:

1. Deskripsi Rumusan Kebijakan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Upaya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam mendorong tercapainya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil yang efektif sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, sehingga tercapai target pengelolaan kawasan konservasi perairan yang berkelanjutan pada 2024.

2. Deskripsi Rumusan Kebijakan Percepatan Penyelesaian Penataan Ruang Daerah dan Kawasan Laut

Upaya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam mendorong tercapainya target penetapan Rencana Tata Ruang Daerah untuk wilayah perairan 0-12 mil dan Kawasan Laut untuk wilayah perairan >12 mil tahun 2024, termasuk implementasi pemanfaatan ruang laut yang dapat dinilai dari capaian PNBP PKKPR.

3. Deskripsi Rumusan Kebijakan Perhitungan Indeks Kesehatan Laut Indonesia

Upaya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam mendorong peningkatan dan perhitungan Indeks Kesehatan Laut Indonesia di level nasional dan daerah serta pemanfaatan jasa-jasa kelautan dan sumber daya kelautan sesuai dengan peruntukannya dengan tetap berorientasi kepada keberlanjutan lingkungan.

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah Kertas Kerja Kebijakan yang ditindaklanjuti (3)}}{\text{Jumlah Kertas Kerja Kebijakan yang ditetapkan (3)}} \times 100\%$$

Tujuan:

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan serta dan mendorong implementasi kegiatan pembangunan di bidang pengelolaan ruang laut dan pesisir

Satuan Pengukuran :

Persentase

Unit Penanggung jawab :

Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir

Unit/Pihak Penyedia Data :

- | |
|--|
| <p>Unit/Pihak Penyedia Data terkait Rumusan Kebijakan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kementerian Kelautan dan Perikanan2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan3. Bappenas4. Badan Riset dan Inovasi Nasional5. Pemerintah Daerah Provinsi6. Perguruan Tinggi7. NGO <p>Unit/Pihak Penyedia Data terkait Rumusan Kebijakan Percepatan Penyelesaian Penataan Ruang Daerah dan Kawasan Laut</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kementerian Kelautan dan Perikanan2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional3. Kementerian Dalam Negeri4. Kementerian Hukum dan HAM5. Kementerian Sekretariat Negara6. Pemerintah Daerah Provinsi <p>Unit/Pihak Penyedia Data terkait Rumusan Kebijakan Perhitungan Indeks Kesehatan Laut Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi2. Kementerian Kelautan dan Perikanan3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan4. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif5. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN7. Badan Riset dan Inovasi Nasional8. Badan Pusat Statistik9. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove10. Badan Karantina Indonesia |
|--|

Sumber Data :

- | |
|---|
| <p>Sumber Data terkait Rumusan Kebijakan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</p> <ol style="list-style-type: none">1. Data Luas dan Capaian Kawasan Konservasi Perairan2. Data Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi yang dilakukan KKP dan KLHK3. Data CTI-CFF4. Data <i>Task Force Blue Health</i> NBAAP5. Laporan Survey Lapangan/Kajian6. Data Statistik dan Data Pendukung Lainnya <p>Sumber Data terkait Rumusan Kebijakan Percepatan Penyelesaian Penataan Ruang Daerah dan Kawasan Laut</p> <ol style="list-style-type: none">1. Data Perpres dan Perda Rencana Tata Ruang2. Data Capaian PNBPK PPKPRL3. Hasil Rapat Lintas Sektor, Harmonisasi, Evaluasi Kemendagri4. Notulensi Rapat Koordinasi <p>Sumber Data terkait Rumusan Kebijakan Perhitungan Indeks Kesehatan Laut Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none">1. Data Statistik dan Laporan Kinerja KKP2. Data Statistik dan Laporan Kinerja KLHK3. Data Statistik dan Laporan Kinerja Kemenparekraf4. Data Statistik BPS5. Data Sistem Informasi Geografis (GIS) Tata Ruang, KemenATR/BPN6. Laporan Riset dan Survei BRIN |
|---|

Jenis Konsolidasi Periode : Sum Average Take last

Jenis Konsolidasi Lokasi : Sum Average Raw Data

Polarisasi Indikator Kinerja : Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan : Triwulan Semesteran Tahunan

Periode Pelaporan	2023		2024
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1	-	-	-
TRIWULAN 2	-	-	-
TRIWULAN 3	-	-	-
TRIWULAN 4	100%	100%	100%

Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir



Dr. Muh. Rasman Manafi, SP., M. Si.

Manual Indikator Kinerja Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir

Sasaran Program (SP)	SS. 1 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir Yang Berkualitas
Deskripsi SP	Deskripsi Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir Yang Berkualitas adalah kondisi terlaksananya pengelolaan sumber daya kemaritiman dan sumber daya alam di lingkungan laut dan pesisir yang dilakukan secara terintegrasi dalam waktu yang lebih singkat melalui penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil.
Indikator Kinerja	: Persentase isu-isu strategis yang diselesaikan
Deskripsi Indikator Kinerja	<p>Definisi: Terdapat 1 Isu Strategis dan 1 Isu RB Tematik pada indikator kebijakan Persentase isu-isu strategis yang diselesaikan dan berikut adalah deskripsi dari masing-masing isu-isu tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Deskripsi Koordinasi Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Upaya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam mendorong tercapainya pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, sehingga tercapai optimalisasi dan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi pada 2024. Deskripsi Pengelolaan Penyelenggaraan Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut di Indonesia Upaya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam mendorong tercapainya pengelolaan penyelenggaraan alur pipa dan/atau kabel bawah laut yang efektif dan efisien, sehingga sesuai dengan ketentuan koridor dan perizinan yang berlaku dan bebas dari konflik pemanfaatan ruang laut lainnya. <p>Formula:</p> $\frac{\text{Jumlah Isu Strategis yang diselesaikan (2)}}{\text{Jumlah Isu Strategis yang ditugaskan (2)}} \times 100$ <p>Tujuan: Untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelesaian isu strategis.</p>
Satuan Pengukuran	: Persentase
Unit Penanggung jawab	: Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir
Unit/Pihak Penyedia Data	<p>Unit/Pihak Penyedia Data terkait Koordinasi Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan</p> <ol style="list-style-type: none"> Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan NGO <p>Unit/Pihak Penyedia Data terkait Pengelolaan Penyelenggaraan Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut di Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL

2. Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Kementerian Perhubungan
4. Kementerian Pertahanan
5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Kementerian Komunikasi dan Informatika
7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8. Badan Informasi Geospasial
9. Pemerintah Daerah Provinsi

Sumber Data terkait Koordinasi Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan

1. Data EVIKA dan METT
2. Data IUCN Green List
3. Data capaian luas kawasan konservasi KKP 2024
4. Data capaian luas kawasan konservasi KLHK 2024

Sumber Data

:

Sumber Data terkait Pengelolaan Penyelenggaraan Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut di Indonesia

1. Data E-PIPAKABEL, Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL
2. Hasil rapat audiensi pihak Pemrakarsa dengan Tim Nasional
3. Hasil *site visit* dan *marine survey* rencana penggelaran alur pipa/kabel
4. Laporan Monitoring dan Evaluasi Tim Nasional Pengelolaan Penyelenggaraan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut

Jenis Konsolidasi Periode

:

Sum Average Take last

Jenis Konsolidasi Lokasi

:

Sum Average Raw Data

Polarisasi Indikator Kinerja

:

Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan

:

Triwulan Semesteran Tahunan

Periode Pelaporan	2023		2024
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1	-	-	-
TRIWULAN 2	-	-	-
TRIWULAN 3	-	-	-
TRIWULAN 4	100%	100%	100%

Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir

Dr. Muh. Rasman Manafi, SP., M. Si.